ETIKA MUAMALAH DALAM HADIST RIWAYAT AL-BUKHARI NO.2079 SEBAGAI LANDASAN MORALITAS EKONOMI DIGITAL DALAM KONTEKS BITCOIN DAN TRADING

M Khabibu Rahman A, Nasrulloh

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
Khabibrahman453@gmail.com, Nasrulloh@syariah.uin.malang.ac.id

Informasi Artikel	Abstract
Vol: 1 No : 12 Desember 2024 Halaman : 68-75	<i>Digital technology has brought significant changes to many aspects of life, including the economy, with the emergence of Bitcoin and trading activities as key innovations. The blockchain technology underlying Bitcoin offers benefits such as transparency, efficiency and wider access to finance, especially on a global level. However, major challenges arise in the form of extreme price volatility, excessive speculation, and potential manipulation that often pose great risks to transaction participants. In the Islamic context, the principles of fairness, honesty and transparency are the main cornerstones of economic activity aimed at creating blessed transactions that do not harm any party, as affirmed in Al-Bukhari's hadith No. 2079. This research uses a qualitative approach based on a literature study to analyze the relevance of the ethical values in the hadith to modern digital economic activity. The findings show that although Bitcoin and digital trading have great potential benefits, their use often involves elements that are prohibited in sharia, such as gharar (uncertainty), riba (interest), and maysir (gambling). Integrating Islamic values, such as openness and fairness, is an important step towards creating a more ethical and sustainable digital economic ecosystem. Technologies such as smart contracts can help maintain transparency and minimize uncertainty, but challenges such as inadequate regulation and the anonymous nature of transactions still require special attention. Hadith Al-Bukhari No. 2079 provides relevant moral guidance to ensure that digital economic activities run in accordance with Islamic principles, support fairness, and protect economic actors from unwanted risks. Thus, this study confirms the importance of applying Shariah principles in building a fair, transparent and balanced digital economic system.</i>
Keywords: Bitcoin Digital economy Hadith Al-Bukhari	

Abstrak

Teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi, dengan munculnya Bitcoin dan aktivitas trading sebagai inovasi utama. Teknologi blockchain yang mendasari Bitcoin menawarkan manfaat seperti transparansi, efisiensi, dan akses keuangan yang lebih luas, terutama di tingkat global. Namun, tantangan besar muncul berupa volatilitas harga yang ekstrem, spekulasi yang berlebihan, dan potensi manipulasi yang sering kali menimbulkan risiko besar bagi para pelaku transaksi. Dalam konteks Islam, prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi menjadi landasan utama dalam aktivitas ekonomi yang bertujuan menciptakan transaksi yang diberkahi dan tidak merugikan pihak mana pun, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Al-Bukhari No. 2079. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur untuk menganalisis relevansi nilai-nilai etika dalam hadis tersebut terhadap aktivitas ekonomi digital modern. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bitcoin dan trading digital memiliki potensi manfaat besar, penggunaannya sering melibatkan unsur-unsur yang dilarang dalam syariah, seperti gharar (ketidakpastian), riba (bunga), dan maysir (perjudian). Pengintegrasian nilai-nilai Islam, seperti keterbukaan dan keadilan, menjadi langkah penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih etis dan berkelanjutan. Teknologi seperti smart contracts dapat membantu menjaga transparansi dan meminimalkan ketidakpastian, tetapi tantangan seperti regulasi yang kurang memadai dan sifat transaksi yang anonim masih membutuhkan perhatian khusus. Hadis Al-Bukhari No. 2079 memberikan panduan moral yang relevan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi digital berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mendukung keadilan, dan melindungi pelaku ekonomi dari risiko yang tidak diinginkan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam membangun sistem ekonomi digital yang adil, transparan, dan seimbang.

Kata Kunci: Bitcoin, ekonomi digital, hadis Al-Bukhari.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Revolusi digital telah melahirkan banyak inovasi baru termasuk ekonomi digital, yaitu suatu transaksi ekonomi yang didukung oleh teknologi untuk memfasilitasi berbagai transaksi dan aktivitas perdagangan. Salah satu perkembangan yang paling menonjol pada zaman modern sekarang ialah munculnya mata uang kripto seperti bitcoin dan trading digital, yang semakin populer dikalangan masyarakat (Hidayat et al., 2022). Dengan menggunakan ponsel pintar atau menggunakan komputer, seseorang sudah dapat melakukan perdagangan aset digital di pasar global, tanpa dibatasi oleh lokasi, kondisi dan waktu. Namun, fenomena ini memunculkan sejumlah pertanyaan, terutama dalam hal etika dan moralitas, khususnya dari sudut pandang hukum Islam yang mengatur transaksi muamalah.

Islam sebagai agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan memberikan panduan moral dan hukum terhadap aktivitas ekonomi dan transaksi perdagangan atau jual beli. Ajaran Islam tidak hanya mengatur ibadah tetapi juga mengatur tentang interaksi sosial, termasuk dalam ekonomi yang biasa disebut muamalah (Muzlifah, 2015). Dalam konteks muamalah, Islam menganjurkan nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran dan transparansi untuk mencegah timbulnya kerugian yang disebabkan oleh penipuan dan ketidakpastian yang berlebihan. Hadist Al-bukhari No. 2079 adalah salah satu rujukan yang menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam bertransaksi (Patmawati, 2021). Didalam hadist ini, nabi Muhammad SAW mengingatkan agar tidak ada unsur penipuan dalam perdagangan yang berarti bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan prinsip-prinsip yang menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Hadist ini memiliki relevansi yang tinggi terhadap konteks ekonomi digital, khususnya dalam aktivitas perdagangan bitcoin dan trading. Perdagangan digital yang tidak memiliki bentuk fisik dan dioperasikan secara online sering kali diwarnai dengan banyak spekulasi. Harga yang tidak tetap atau tidak sesuai terkadang naik turun juga cepat serta berpotensi dimanipulasi. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan aspek etika dan moralitas dalam perdagangan modern sekarang agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menolak ketidakpastian dan perjudian. Dalam fiqh kontemporer menekankan bahwa prinsip keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi adalah hal yang fundamental yang harus dijaga dengan baik, baik dalam transaksi secara konvensional maupun digital (Anwar, 2014). Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjaga transaksi secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak, suatu nilai yang sangat penting diterapkan dalam ekonomi digital atau perdagangan secara online cenderung tidak transparan dan manipulatif.

Bitcoin dan bentuk-bentuk aset digital lainnya memiliki karakteristik yang sangat jauh berbeda dengan aset tradisional, sehingga menimbulkan tantangan baru dalam hal regulasi dan pengawasan. Salah satu tantangan utama yang harus dihadapi adalah spekulasi yang sangat tinggi sehingga menimbulkan perilaku yang mirip seperti perjudian. ekonomi Islam di era digital adalah transaksi yang tidak memenuhi prinsip-prinsip kejujuran dan cenderung spekulatif yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan (Zainudin Hasan et al., 2024). oleh karena itu, menekankan pentingnya nilai kejujuran dan keterbukaan dalam bertransaksi ekonomi digital sebagai upaya untuk melindungi perilaku perdagangan ekonomi yang beresiko yang tidak diinginkan. Hal ini sesuai dengan hadist yang memerintahkan pelaku usaha untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain dan untuk menjaga transparansi sebagai upaya untuk menciptakan transaksi yang adil dan tidak manipulatif.

Selain aspek etika dalam transaksi, ekonomi digital juga menuntut penerapan regulasi yang mendukung nilai-nilai Islam agar dapat berfungsi secara adil dan merata. Dalam lingkungan digital, penipuan dapat terjadi dengan mudah, mengingat transaksi bersifat anonim dan terjadi dalam jaringan global yang sulit diawasi. Dalam hal ini, hadist Al-Bukhari No. 2079 dapat berfungsi sebagai dasar moralitas untuk menjaga agar transaksi dalam ekonomi digital tetap berjalan sesuai dengan prinsip

syariah, yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan tanggung jawab moral dalam bertransaksi. Nilai-nilai ini diharapkan dapat mencegah pelaku ekonomi dari praktik-praktik yang merugikan dan melanggar etika, seperti manipulasi harga dan penipuan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis berbasis teks, berfokus pada eksplorasi nilai-nilai etika dalam Hadis Riwayat Al-Bukhari No. 2079 serta penerapannya dalam ekonomi digital seperti Bitcoin dan trading (Nurandani, 2023). Jenis penelitian ini tergolong studi kepustakaan, dengan data primer berupa hadis terkait beserta tafsir dan syarahnya, sedangkan data sekunder mencakup literatur tentang etika muamalah Islam, ekonomi digital, Bitcoin, trading, serta fatwa ulama dan lembaga keagamaan (Pranagara et al., 2024). Data dikumpulkan melalui studi dokumen, meliputi eksplorasi konteks hadis, kajian literatur, dan analisis komparatif untuk menghubungkan prinsip-prinsip muamalah seperti keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*ash-shidq*), serta larangan gharar dengan praktik transaksi digital (Fatdar Furqan, 2019). Analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis isi, dengan langkah-langkah seperti menafsirkan pesan moral hadis, mengidentifikasi prinsip-prinsip utama muamalah, dan menerapkannya pada ekonomi digital. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan mengacu pada berbagai kitab tafsir dan syarah, serta konsistensi analisis terhadap relevansi prinsip Islam dalam ekonomi digital kontemporer. Penelitian ini menyadari keterbatasan, seperti akses terhadap data empiris mengenai praktik Bitcoin dan trading di kalangan Muslim, serta potensi perbedaan interpretasi relevansi hadis dalam konteks modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN BITCOIN

Bitcoin adalah mata uang digital terdesentralisasi yang memungkinkan transaksi keuangan secara peer-to-peer tanpa memerlukan otoritas pusat seperti bank atau lembaga keuangan tradisional (Budi Dharma et al., 2023). Transaksi ini didukung oleh teknologi blockchain, yaitu sistem pencatatan terdistribusi yang menggunakan enkripsi untuk menjaga keamanan dan transparansi. Selain itu, Bitcoin memiliki nilai ekonomi sebagai aset digital yang dapat dimiliki dan diperdagangkan, sehingga sering dianggap sebagai alternatif investasi yang menarik, terutama untuk transaksi internasional (Budi Dharma et al., 2023). Namun, dari perspektif Islam, para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai hukum penggunaannya. Beberapa ulama menyatakan bahwa Bitcoin dapat dianggap sah jika transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam, seperti menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) (Eka Sakti Habibullah, 2018). Misalnya, fluktuasi harga Bitcoin yang sangat tinggi dapat menciptakan ketidakpastian atau gharar, yang berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Selain itu, meskipun Bitcoin tidak langsung terlibat dalam sistem bunga atau riba, penggunaan leverage dalam trading Bitcoin berpotensi mengarah pada riba, karena melibatkan pinjaman dengan bunga yang merugikan pihak tertentu. Begitu pula, trading Bitcoin yang berfokus pada spekulasi harga jangka pendek dapat dianggap mengandung unsur maysir, yaitu bentuk perjudian yang merugikan karena bergantung pada fluktuasi pasar yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, meskipun Bitcoin dapat diterima dalam syariah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, penting untuk memastikan transaksi dilakukan secara transparan, adil, dan tanpa unsur yang merugikan pihak manapun (Feliyani & Ardiyanto, 2022).

Bitcoin sebagai mata uang digital telah menjadi subjek perdebatan yang intensif di kalangan ulama terkait kesesuaiannya dengan prinsip muamalah dalam Islam. Sebagian ulama menganggap Bitcoin halal karena memenuhi syarat sebagai mal (harta) yang memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dan digunakan untuk transaksi yang tidak melanggar syariat. Mereka juga menyoroti transparansi yang ditawarkan oleh teknologi blockchain, sebuah sistem pencatatan terdesentralisasi yang mendukung kejujuran dan kejelasan dalam transaksi. Dengan teknologi ini, setiap transaksi dicatat secara permanen dan terbuka, sehingga mengurangi potensi gharar (ketidakpastian), asalkan pihak-pihak yang terlibat memahami prosesnya. Selain itu, Bitcoin dinilai memiliki potensi untuk mendukung inklusi keuangan, terutama di wilayah-wilayah yang kurang terlayani oleh sistem keuangan tradisional (Budi Dharma et al., 2023).

Namun, pandangan lain menyatakan bahwa Bitcoin tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung beberapa elemen yang dilarang dalam Islam. Salah satu kekhawatiran utama adalah volatilitas harga Bitcoin yang sangat tinggi, yang menciptakan tingkat gharar yang signifikan, sehingga transaksi yang melibatkan Bitcoin berisiko tinggi bagi para pengguna. Ketidakpastian ini membuat Bitcoin sering dianggap lebih menyerupai

spekulasi daripada alat transaksi atau investasi yang stabil. Selain itu, aktivitas spekulatif yang mendominasi perdagangan Bitcoin dianggap memiliki kemiripan dengan maysir (perjudian), yang jelas-jelas dilarang dalam Islam. Penggunaan Bitcoin dalam beberapa praktik tertentu, seperti pinjaman berbasis bunga, juga berpotensi melibatkan riba, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam syariah. Kekhawatiran lainnya adalah kurangnya dukungan Bitcoin oleh otoritas resmi atau aset fisik, sehingga menimbulkan keraguan apakah Bitcoin memenuhi kriteria sebagai mata uang sah dalam perspektif hukum Islam (Rumondang, 2020).

Di luar perdebatan ini, para ulama sepakat bahwa transaksi keuangan dalam Islam harus memenuhi prinsip-prinsip seperti keadilan, kejelasan, dan larangan terhadap praktik yang merugikan. Oleh karena itu, halal atau haramnya Bitcoin dalam Islam sering kali bergantung pada konteks penggunaannya. Misalnya, jika Bitcoin digunakan untuk tujuan yang baik dan sesuai dengan syariat, seperti transaksi jual beli halal tanpa spekulasi berlebihan, beberapa ulama memandangnya dapat diterima. Namun, jika digunakan untuk tujuan yang melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti perjudian atau investasi dengan tingkat risiko yang tidak wajar, maka penggunaannya menjadi tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, Bitcoin masih menjadi isu yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang hati-hati dalam interpretasi hukum Islam.

TRADING

Dalam era ekonomi digital yang terus berkembang pesat, Islam memberikan panduan yang jelas dan prinsipil terkait perdagangan berbasis teknologi, termasuk trading aset digital seperti Bitcoin dan mata uang kripto lainnya. Prinsip-prinsip syariah yang diusung oleh Islam menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan penghindaran praktik-praktik yang merugikan seperti gharar (ketidakpastian berlebihan) dan spekulasi yang berisiko tinggi. Prinsip etika dalam trading adalah memastikan semua transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa unsur gharar (ketidakpastian) atau spekulasi yang berlebihan, yang dapat merugikan pihak lain. Islam menegaskan pentingnya transaksi yang jelas dan bebas dari unsur riba, serta menghindari praktik yang memanipulasi pasar (Chaira et al., 2023). Dalam konteks ini, kegiatan perdagangan digital harus sesuai dengan aturan yang mendorong keadilan bagi semua pihak yang terlibat, memastikan transaksi dilakukan secara transparan tanpa adanya penipuan atau manipulasi harga. Sebagai contoh, spekulasi yang hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga tanpa memperhatikan nilai riil dari aset yang diperdagangkan dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah (Bhinadi, 2018).

Penerapan etika dalam trading cryptocurrency berdasarkan prinsip syariah menuntut perhatian terhadap berbagai elemen yang bisa mempengaruhi keadilan, transparansi, dan keabsahan transaksi. Dalam Islam, transaksi finansial harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan spekulasi. Misalnya, trading aset yang berfluktuasi tajam dan sangat spekulatif dapat dipandang melanggar prinsip syariah karena menimbulkan ketidakpastian yang berlebihan (gharar), yang dilarang dalam fiqh muamalah (Triwibowo & Adam, 2023). Sebagai contoh, cryptocurrency seperti Bitcoin sering dianggap kontroversial dalam konteks Islam karena volatilitas yang tinggi, yang dapat menimbulkan spekulasi berlebihan. Sebagian ulama menyatakan bahwa transaksi semacam ini mungkin tidak sesuai dengan hukum Islam, terutama terkait dengan masalah gharar dan qimar (perjudian) (Saiti & Abdullah, 2016). Namun, ada juga pandangan yang lebih moderat, yang memungkinkan penerapan teknologi blockchain dan cryptocurrency, asalkan transaksi dilakukan secara transparan dan tidak melibatkan unsur riba atau penipuan. Penting untuk mencatat bahwa Islam mengharuskan kontrak yang adil dan jelas. Oleh karena itu, dalam trading syariah, penting untuk menggunakan kontrak yang menghindari ketidakjelasan (gharar) dan penipuan. Penggunaan teknologi seperti smart contracts di platform blockchain dapat membantu memastikan transparansi dan keadilan dalam transaksi, sesuai dengan prinsip syariah yang mengutamakan kejujuran dan kemanfaatan sosial.

Platform perdagangan Islam telah mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem operasionalnya dengan pendekatan inovatif yang memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dalam setiap aspek transaksi. Salah satu prinsip dasar yang diterapkan adalah menghindari riba, yang dalam hukum syariah diartikan sebagai tambahan tidak sah dalam transaksi keuangan yang merugikan salah satu pihak. Langkah ini dilakukan dengan menghapuskan bunga dalam skema pembayaran, baik dalam bentuk cicilan maupun investasi berbasis dana (Fradesa et al., 2022). Selain itu, platform-platform ini juga memastikan bahwa kontrak yang digunakan dalam transaksi memiliki kejelasan dan kepastian hukum sesuai syariah, sehingga mengurangi risiko ketidakpastian atau gharar.

Transparansi dalam proses perdagangan juga menjadi prioritas utama. Ini berarti bahwa pengguna platform diberi informasi yang lengkap mengenai syarat, ketentuan, serta risiko yang mungkin terjadi dalam setiap transaksi. Transparansi ini membantu mencegah manipulasi pasar yang dapat merugikan pihak-pihak yang

terlibat. Dengan adanya kontrak yang jelas dan informasi yang terbuka, perdagangan menjadi lebih etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Taskiya & Surabaya, n.d.). Contoh nyata dari penerapan prinsip ini dapat dilihat pada fitur seperti Shopee Barokah dan Tokopedia Salam, dua platform yang dirancang untuk memfasilitasi perdagangan berbasis syariah. Shopee Barokah menawarkan produk-produk halal yang diawasi dengan ketat untuk memastikan kesesuaiannya dengan hukum Islam, sementara Tokopedia Salam menyediakan layanan perdagangan yang bebas dari unsur riba dan gharar (Indriani et al., 2024). Kedua platform ini juga memberikan akses kepada pengguna untuk berdonasi atau membayar zakat secara digital, menambahkan dimensi sosial pada transaksi yang mereka fasilitasi.

Selain itu, platform-platform ini sering kali bekerja sama dengan lembaga sertifikasi halal dan otoritas keuangan syariah untuk memastikan bahwa semua layanan mereka memenuhi standar yang telah ditetapkan. Inovasi ini memungkinkan pelaku usaha Muslim untuk menjalankan bisnis mereka tanpa melanggar prinsip-prinsip agama, sekaligus memberikan pilihan bagi konsumen untuk berbelanja dengan keyakinan bahwa transaksi mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam (Benayn Bilalakram Hudoyo, 2024). Dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi, platform perdagangan berbasis syariah ini tidak hanya menciptakan ekosistem yang lebih inklusif tetapi juga mempromosikan nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Upaya ini menunjukkan bahwa prinsip Islam dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam model bisnis modern, menjadikan perdagangan digital sebagai sarana untuk memperkuat etika dan spiritualitas dalam ekonomi global (Chaira et al., 2023).

ETIKA MUAMALAH DALAM ISLAM

Dalam hukum Islam sendiri juga mengatur tentang Prinsip etika muamalah dalam Islam bertumpu pada kejujuran (*sidq*) dan keadilan (*'adl*), yang merupakan nilai utama dalam menjalankan transaksi yang sesuai syariat (Nasrulloh, 2010). Kejujuran dalam transaksi diwajibkan agar tidak terjadi penipuan, manipulasi, atau tindakan curang lainnya, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadits: *"Barang siapa yang menipu, maka ia bukan golonganku."* (HR Muslim). Larangan ini menunjukkan pentingnya transparansi dan keterbukaan, di mana pelaku usaha wajib menyampaikan informasi yang jelas mengenai barang atau jasa, termasuk cacat yang ada. Kejujuran juga mendatangkan keberkahan dalam transaksi, sebagaimana dinyatakan dalam hadits: *"Jika keduanya berlaku jujur dan menjelaskan, transaksi mereka diberkahi."* (HR Bukhari dan Muslim) (Bhinadi, 2018). Sementara itu, keadilan menuntut setiap pihak mendapatkan haknya tanpa ada yang dirugikan. Allah SWT memerintahkan manusia untuk menjaga keadilan dalam timbangan dan ukuran, sebagaimana firman-Nya: *"Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."* (QS. Al-Muthaffin: 1-3). Prinsip ini mencakup larangan terhadap riba, gharar (ketidakpastian), dan berbagai bentuk penipuan yang dapat merugikan pihak lain (Meranti & Yazid, 2021).

Kejujuran dan keadilan memiliki implikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti kewajiban penjual untuk mengungkapkan informasi produk dengan benar, dan larangan bagi pembeli untuk menggunakan tipu daya demi keuntungan sepihak. Dalam sistem ekonomi Islam, penerapan larangan riba dan transaksi spekulatif menjadi bukti konkret dari prinsip ini. Dengan demikian, kejujuran dan keadilan dalam transaksi tidak hanya menjadi nilai moral, tetapi juga kewajiban syariat yang bertujuan menciptakan keberkahan dan kesejahteraan bagi semua pihak (Djamil, 2023). Dengan demikian, bagi para investor Muslim, penting untuk memastikan bahwa kegiatan trading yang mereka lakukan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti riba, gharar, dan spekulasi, serta untuk memilih alternatif investasi yang sesuai dengan ketentuan Islam.

TINJAUAN HADIST RIWAYAT AL-BUKHARI NO. 2079

Hadis Riwayat Al-Bukhari No. 2079 memberikan pedoman etis yang sangat mendalam dalam praktik jual beli, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa keberkahan dalam transaksi akan tercapai jika kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, bersikap jujur, transparan, dan menjelaskan segala aspek terkait barang atau jasa yang diperjualbelikan (Mahipal (fakultas Hukum Universitas Pakuan), 2021). Sebaliknya, jika ada kebohongan atau penyembunyian kekurangan, keberkahan dalam transaksi tersebut akan hilang. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, yang menyerukan penulisan dan kejelasan dalam transaksi untuk mencegah kecurangan: *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."* Ayat ini mengajarkan pentingnya mencatat kesepakatan secara rinci dan jujur agar tercapai keadilan dalam muamalah (Rahmiati, 2023). Pesan dari hadis dibawah ini menekankan bahwa transaksi yang diberkahi tidak hanya tentang keuntungan materi tetapi juga tentang membangun hubungan saling percaya dan menghormati antara para pihak. Dalam teks hadis ini.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَيْعَانِ بِالْحَيْثَرِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ هُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Dari Hakim bin Hizam, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Penjual dan pembeli berhak memilih (antara meneruskan atau membatalkan) selama keduanya belum terpisah, atau beliau bersabda, hingga keduanya terpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (aib barang) maka jual beli keduanya diberkahi, dan jika keduanya menyembunyikan (aib barang) dan berdusta maka barakah jual beli keduanya lenyap." (HR, al-bukhari, hadist No. 2079.)(Bhinadi, 2018)

Berdasarkan dalil diatas, jual beli diperbolehkan dalam syariat Islam. dalam melakukan transaksi jual beli telah diberi petunjuk agar berlaku jujur dan menjelaskan keadaan barang apa adanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam menegaskan pentingnya kejujuran, transparansi, dan hak untuk memilih dalam transaksi, di mana Rasulullah SAW memberikan panduan bahwa penjual dan pembeli memiliki kebebasan untuk meneruskan atau membatalkan transaksi selama keduanya belum berpisah, dengan syarat adanya kejujuran dalam menjelaskan kondisi barang yang diperjualbelikan. Prinsip ini mencerminkan fondasi etika ekonomi Islam yang menekankan pada keterbukaan informasi sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam setiap interaksi bisnis, sekaligus memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan dari salah satu pihak. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, baik penjual maupun pembeli tidak hanya membangun kepercayaan dan hubungan yang sehat, tetapi juga memperoleh keberkahan dari aktivitas ekonomi mereka, sebagaimana dijelaskan bahwa transaksi yang dilakukan dengan menyembunyikan aib barang atau dengan berdusta akan menghilangkan keberkahan tersebut. Dalam konteks modern, hadis ini sangat relevan untuk diterapkan dalam berbagai bentuk perdagangan, baik tradisional maupun digital.

Prinsip kejujuran ini sangat relevan dalam kehidupan modern, di mana transaksi tidak hanya dilakukan secara langsung tetapi juga melalui media digital seperti e-commerce. Dalam konteks ini, transparansi dalam memberikan deskripsi produk, keterbukaan tentang cacat atau kualitas barang, serta layanan pelanggan yang baik menjadi wujud nyata penerapan hadis ini (Febriyarni, 2016). Contoh nyata penerapan prinsip ini juga dapat ditemukan dalam konteks lokal, seperti jual beli karet yang menggunakan panduan etika bisnis Islam untuk menciptakan transaksi yang adil dan penuh keberkahan (Kurniawan, 2017). Buku seperti "Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah" karya A. Bhinadi menguraikan bagaimana kejujuran dalam transaksi ini dapat menjadi fondasi utama untuk mencapai keberkahan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional (Bhinadi, 2018). Hal ini juga diperkuat dalam jurnal "Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam", yang membahas pengaruh hadis ini dalam membangun sistem ekonomi Islami yang lebih adil dan beretika (Eka Sakti Habibullah, 2018).

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara manusia bertransaksi, termasuk munculnya Bitcoin dan perdagangan digital. Teknologi blockchain yang mendukung Bitcoin memberikan keunggulan seperti transparansi dan efisiensi, memudahkan transaksi global tanpa batas ruang dan waktu. Namun, di balik itu, ada risiko besar seperti perubahan harga yang tidak menentu (gharar), spekulasi berlebihan yang menyerupai perjudian (maysir), dan potensi manipulasi yang merugikan.

Dalam Islam, prinsip utama dalam transaksi adalah kejujuran, keadilan, dan transparansi, sebagaimana yang diajarkan dalam Hadis Riwayat Al-Bukhari No. 2079. Hadis ini mengingatkan pentingnya keterbukaan dalam jual beli agar transaksi tidak hanya adil tetapi juga membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat.

Pada era ekonomi digital, prinsip-prinsip ini sangat relevan. Transaksi yang sering kali bersifat anonim dan minim regulasi menuntut perhatian khusus. Teknologi seperti *smart contracts* bisa membantu menciptakan transparansi dan keadilan, tetapi pelaku ekonomi juga perlu memastikan bahwa semua aktivitasnya sesuai dengan etika. Regulasi yang lebih kuat dan edukasi tentang nilai-nilai moral dalam Islam menjadi kunci untuk menjaga ekosistem digital tetap sehat dan adil. Kesimpulannya, ekonomi digital dapat menjadi sarana kemajuan yang penuh berkah jika dijalankan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Teknologi modern dapat mendukung kesejahteraan bersama jika dikelola dengan pendekatan etis yang benar.

REFERENCES

- Ananto Triwibowo and Muhammad Afani Adam, "Margin : Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Bisnis Di Era Digital Ekonomi," *Margin : Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2023): 25–36, <https://doi.org/10.58561/margin.v2i1.65>.
- Ardito Bhinadi, "Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah" (deepublish, 2018).
- Asep Syarifuddin Hidayat et al., *Mata Uang Kripto., Ekonomika-Journal of Economic Theory and Practice and Social Issues*, vol. (1), 2022, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/68537/1/Buku.pdf>.
- Bhinadi, "Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah."
- Budi Dharma, Putri Gusniati, and Tria Wardani, "Analisis Pemanfaatan Cryptocurrency Bitcoin Sebagai Alat Alternatif Investasi," *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis* 2, no. 1 (2023): 175–82, <https://doi.org/10.55606/jupsim.v2i1.858>.
- Budi Dharma, Putri Gusniati, and Tria Wardani, "Analisis Pemanfaatan Cryptocurrency Bitcoin Sebagai Alat Alternatif Investasi."
- Budi Dharma, Putri Gusniati, and Tria Wardani.
- Buerhan Saiti and Adam Abdullah, "Prohibited Elements in Islamic Financial Transactions: A Comprehensive Review," *Al-Shajarah* 21, no. Specialissue (2016): 139–59.
- Busra Febriyarni, "Fiqh Al-Hadis Etika Bisnis," *Al Istinbath , Jurnal Hukum Islam* Vol 1, no. No 2 (2016): 14, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/119>.
- Chaira, Yolanda, and Hasanah, "Perdagangan Online Dalam Perspektif Ekonomi Syariah."
- Edi Kurniawan, "SKRIPSI PELAKSANAAN JUAL BELI KARET MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM," 2017.
- Eka Sakti Habibullah, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (2018): 25, <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>.
- Fatdar Furqan, "Analisis Keabsahan Transaksi Mata Uang Digital Bitcoin Dari Perspektif Muamalah," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019, 2013–15.
- Fiza Fradesa et al., "Fitur Shopee Barokah Dan Tokopedia Salam: Inovasi Marketplace Halal Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Digital Berbasis Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2893, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6559>.
- Gita Indriani et al., "PENGARUH CUSTOMER FEEDBACK PADA TOKOPEDIA SALAM TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL SYARIAH (Studi Kasus Di Martapura Dan," 2024, 1–10.
- Habibullah, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam."
- Inud Danis Ikhwan Meranti and Azy Athoillah Yazid, "Peran Baitul Mal Wat Tamwil Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif," *Economic : Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 12, no. 01 (2021): 31–38, <https://doi.org/10.59943/economic.v12i01.64>.
- Jurnal Ilmiah and Wahana Pendidikan, "Peran Faktor Teknologi Informasi Dan Personal Terhadap Minat Beli Konsumen Pada E-Commerce Produk Halal (Studi Kasus: Konsumen Shopee Barokah)" 10, no. April (2024): 275–89.
- M. S. Anwar, *Fiqh Muamalah: Pendekatan Kontemporer.*, 2014.

- Mahipal (fakultas Hukum Universitas Pakuan), "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM MENGATUR TATA CARA JUAL BELI (The Perspective of Shariah Law to Govern the Fairness Trade Procedures)" 07, no. vii (2021): 127–41.
- Mudrik Asrof Nurandani, "Transaksi Bitcoin Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Dan Fiqh Muamalah," 2023, <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/7252/>.
- Nani Feliyani and Muhammad Hery Ardiyanto, "Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Perspektif Fiqh Muamalah," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (2022): 109–24, <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11i1.338>.
- Nasrullah Djamil, "Akuntansi Terintegrasi Islam : Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan," *JAAMTER : Jurnal Audit, Akuntansi, Manajemen Terintegrasi* 1, no. 1 (2023): 5.
- Nasrulloh Nasrulloh, "Maqasid Shari'ah Sebagai Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 2, no. 2 (2010), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2970>.
- Natasya Rumondang, "Interaksionisme Simbolik Michalowski Dalam Memandang Bitcoin Sebagai Kejahatan," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 15, no. 1 (2020): 11–18.
- Pranagara et al., "Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *JAMA: Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 1 (2024): 32–52.
- Siregar Rahmiati, *Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Pasar Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan) Pelaksanaan*, 2023.
- Teuku Muhammad Iqbal Chaira, Cindy Yolanda, and Uswatun Hasanah, "Perdagangan Online Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Syiar-Syiar* 3, no. 2 (2023): 95–106, <https://doi.org/10.36490/syiar.v3i2.1085>.
- Tria Nanda Taskiya and Universitas Muhammadiyah Surabaya, "FITUR TOKOPEDIA HALAL CORNER SEBAGAI E- COMMERCE HALAL DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL BERBASIS SYARIAH DI," n.d., 38–48.
- Universiti Teknologi, "MAQASHID SYARIAH SEBAGAI PARADIGMA DASAR EKONOMI ISLAM Eva," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. December (2015): 118–38.
- Yeti Patmawati, "Online Shop Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Volume* x (2021), <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/m7w23>.
- Zainudin Hasan et al., "Regulasi Penggunaan Teknologi Blockchain Dan Mata Uang Kripto Sebagai Tantangan Di Masa Depan Dalam Hukum Siber," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 2 (2024): 55–69, <https://doi.org/10.55606/ birokrasi.v2i2.1163>.